

Putra Gampong Ilie Ulee Kareng Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRK

Category: Aceh, News

written by Maulya | 14/10/2024



ORINEWS.id – Putra asli Banda Aceh yang berasal dari Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Musriadi, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRK Banda Aceh periode 2024-2029. Bersama dua pimpinan DPRK lainnya Musriadi dilantik pada Senin (14/10/2024).

Politisi muda dari Partai Amanat Nasional itu mendapat kepercayaan besar untuk menduduki kursi pimpinan DPRK Banda Aceh.

Kali ini, dengan perolehan suara bagi partainya di Pemilu 2024, Musriadi resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRK Banda

Aceh. Menurutnya itu merupakan posisi prestisius yang mencerminkan kiprah panjangnya selama lima tahun terakhir sebagai legislator mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dengan pengalamannya yang telah menginjak periode kedua sebagai anggota dewan, Musriadi menjadi figur yang tak hanya dikenal di kalangan elite politik, akademisi, dan organisator saja, tetapi juga dekat dengan konstituennya.

Di mata publik, Musriadi bukan sekadar wakil rakyat, tetapi juga sebagai jembatan yang tak lelah memperjuangkan aspirasi kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng.

Pelantikan Musriadi sebagai Wakil Ketua DPRK Banda Aceh dinilai membawa optimisme baru, baik di kalangan internal partai maupun bagi masyarakat.

Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan dekat dengan media, serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan penting.

“Ini amanah besar yang harus saya emban dengan penuh tanggung jawab,” ucap Musriadi, Senin (14/10/2024).

Ia menegaskan bahwa posisinya bukan sekadar jabatan, tetapi juga sebuah tugas untuk terus istikamah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tantangan besar ke depan adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Semoga amanah ini dapat memperkuat fungsi dasar DPRK, yaitu di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tiga fungsi ini harus berjalan seiring dan saling mendukung,” katanya.

Musriadi berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Ia juga berharap doa dan dukungan agar senantiasa dapat menjalankan amanah sebagai

wakil rakyat selama lima tahun mendatang.

Ia juga menaruh harapan agar dengan posisinya nanti dapat bekerja lebih efektif dan profesional dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Banda Aceh.

Dalam perjalanan politiknya, Musriadi banyak menduduki jabatan strategis yang dipercayakan oleh Partai Amanat Nasional mulai dari ketua Ranting PAN Gampong Ilie, ketua DPC PAN Kecamatan Ulee Kareng, sekretaris DPD PAN Banda Aceh, sekretaris DPW BM PAN Aceh, dan sekarang dipercayakan sebagai Ketua Harian DPD PAN Banda Aceh.

Pada periode pertama menjabat anggota DPRK ia dipercayakan sebagai ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Sekretaris Fraksi PAN dan Anggota Komisi IV Bidang Kesejahteraan.

Salah satu figur muda yang dipercayakan oleh DPP Partai Amanat Nasional itu kini resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK definitif untuk periode 2024-2029.

Saat dilantik sebagai Wakil Ketua DPRK, politisi muda PAN ini menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

“Saya menyadari tanggung jawab ini tidaklah ringan, tetapi dengan dukungan seluruh pihak, insyaallah kita akan bekerja bersama untuk kemajuan Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Alumnus FKIP Universitas Serambi Mekkah ini juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak hanya hasil kerja keras dirinya, tapi juga kepercayaan dari masyarakat dan dukungan penuh untuk Partai Amanat Nasional.

Sebagai Wakil Ketua DPRK, Alumnus S2 Magister Administrasi Pendidikan dan magister pendidikan biologi Pascasarjana

Universitas Syiah Kuala dan Alumnus Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Medan ini berkomitmen untuk mengedepankan keterbukaan, musyawarah, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan penguatan fungsi pengawasan pemerintah daerah.[]